

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TANDA TANGAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

JAKA ADIPURA
NPM. 0871010098

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
TANDA TANGAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**

Oleh :

JAKA ADIPURA
NPM. 0871010098

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
TANDA TANGAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/Pid.B/2010/PN.Sby.)

Oleh:

JAKA ADIPURA
NPM. 0871010098

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 30 Juli 2012

Pembimbing Utama,

Tim Penguji,

Mas Anienda TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

H. Sutrisno SH, M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mas Anienda TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
TANDA TANGAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/Pid.B/2010/PN.Sby.)

Oleh:

JAKA ADIPURA
NPM. 0871010098

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 30 Juli 2012

Pembimbing Utama,

Tim Penguji

Mas Anienda TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

H. Sutrisno SH, M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mas Anienda TF., SH., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 1962025 199 103 1 00 1

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
TANDA TANGAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/Pid.B/2010/PN.Sby.)

Disusun Oleh :

JAKA ADIPURA
NPM. 0871010098

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Pembimbing Utama

Mas Anienda TF., SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM
NIP.1960212 198803 1 001

Surat Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaka Adipura
Tempat/Tgl Lahir : Sampang, 26 Mei 1988
NPM : 0871010098
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Baruk Tengah, Blok CC/31B, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
TANDA TANGAN (Studi Kasus pada Putusan Nomor 2045/Pid.B/2010/PN.Sby)
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka
saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan saya
(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 Juli 2012

Mengetahui,

Pembimbing

Penulis,

Mas Anienda.TF, SH.,MH
NPT. 3 7709 07 0223

Jaka Adipura
NPM. 0871010098

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilaalamiin, segala puji bagi Allah SWT, sang pemberi nafas pada seluruh makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur di panjatkan atas selesainya skripsi ini sejujurnya penulis akui bahwa pendapat sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri karena itu, kebanggaan penulis bukanlah pada selesainya Skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukan diri sendiri. Semua kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian Skripsi itu, sehingga penulis mampu menyusun skripsi dengan judul “ PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN ”. Penulisan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan Tugas Akhir dalam mencapai Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak. Haryo Sulistiyantoro, SH., MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak. Drs. Gendut Sukarno, MS. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak. Subani ,SH,.M.Si, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Mas Anienda TF., SH., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan baik.
6. Semua staf dosen maupun staf pegawai fakultas yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada yang terhormat dan tersayang kedua orang tua beserta Keluarga Besar penulis yang telah membantu dan memberikan semangat dalam Skripsi penulis.

Surabaya, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.5.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan	7
1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana	7
1.5.1.2 Macam – Macam Tindak Pidana	9
1.5.1.3 Unsur - unsur Tindak Pidana	10
1.5.1.4 Subjek Delik dan Rumusan delik	11
1.5.2 Definisi Pemalsuan	13
1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan	15
1.5.2.2 Faktor – Faktor Pemalsuan Tanda Tangan	17
1.5.2.3 Pemalsuan Dalam Surat - Surat	18
1.5.3 Definisi Dokumen, surat, akta, dan tanda tangan	25
1.5.4 Definisi Pertanggung Jawaban	25
1.6 Metodologi Penelitian	29
1.6.1 Jenis Penelitian	29

1.6.2 Sumber Data	30
1.6.3 Pengumpulan Data	31
1.6.4 Teknik Analisis data.....	31
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	32
BAB II FAKTOR YANG DAPAT MENDORONG PELAKU DALAM	
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA	
TANGAN.....	35
2.1 Jenis Pemalsuan Tanda Tangan yang Dilakukan Dalam Putusan	
Nomor : 2045/Pid.B/2010/Pn.Sby	35
2.2 Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan	40
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA	
PEMALSUAN TANDA TANGAN.....	49
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor :	
2045/Pid.B/2010/PN.Sby	49
3.2 Analisa Terhadap Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya	
Nomor:2045/Pid.B/2010/PN.Sby	51
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Lampiran 2 : Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Lampiran 3 : Surat Pengantar Research / Penelitian Pengadilan Negeri Surabaya.

Lampiran 4 : Putusan Perkara Nomor : 2045/Pid.B/2010/PN.Sby

HASIL WAWANCARA

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana ?

Jawab : a. sengaja atau tidaknya perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut

b. akibat dari perbuatan pidana tersebut yaitu beresiko atau tidaknya perbuatan tersebut bagi korban dan kalangan di sekitar korban.

c. Maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. pada realitanya, apa saja yang menjadi faktor pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Jawab : a. faktor ekonomi, misalnya kebanyakan kasus pemalsuan tanda tangan atau memalsukan surat atau pemalsuan surat, banyak dikarenakan adanya perihal menguntungkan pelaku berupa nominal materi yang tidak sedikit, misalnya memalsukan tanda tangan surat hak milik tanah untuk digadaikan, pemalsuan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini marak terjadi, dan sebagainya.

b. faktor sosial, dimana hal ini kebanyakan pelaku pemalsuan tanda tangan disebabkan faktor masyarakat sekitar, atau dalam arti pelaku keseringan berada dalam ruang lingkup orang berperilaku jahat.

c. perkembangan IPTEK berpengaruh besar juga terhadap perkembangan kriminalitas, misalnya dalam hal pemalsuan tanda tangan semakin berkembang dalam hal modus pemalsuannya dengan cara menggunakan mesin scanner atau pun dengan adanya fotocopy warna, dimana beliau juga menyebutkan bahwa Televisi atau film juga berpengaruh besar, misalnya dalam acara televisi yang menyiarkan

tentang kupas tuntas dalam melakukan kejahatan, sehingga banyak para pelaku yang dengan mudah mempelajari celah dalam melakukan kejahatan tersebut.

3. mengapa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, tindak pidana pemalsuan surat dikenai kurungan selama 6 tahun penjara, akan tetapi pada putusan perkara Nomor : 2045/Pid.B/2010/Pn.Sby, hanya mendapatkan tuntutan selama 5 bulan penjara dan diputuskan 3 bulan penjara ?

Jawab : Dalam permasalahan tuntutan tersebut menjadi wewenang Jaksa Penuntut umum dan tidak ada kaitannya dengan wewenang Hakim, Hakim memutuskan 2 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa dikarenakan adanya pertimbangan hakim yang meringankan yang telah disebutkan diatas, ada juga yang menjadi faktor meringankan dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana memalsukan surat, yaitu surat yang dipalsukan masih dibutuhkan lagi atau tidak, jika surat tersebut masih bias diperbaharui oleh korban dan ada kata maaf dari pihak korban, hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Faktor apakah yang sering menjadikan seseorang melakukan pemalsuan atau memalsukan surat ?.

Jawab : Kebanyakan kasus pemalsuan tanda tangan atau memalsukan surat atau pemalsuan surat, banyak dikarenakan adanya perihal menguntungkan pelaku berupa nominal materi yang tidak sedikit, misalnya memalsukan tanda tangan surat hak milik tanah untuk digadaikan, pemalsuan ijazah untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini marak terjadi, dan sebagainya atau dalam garis besarnya pemalsuan surat dapat terjadi berdasarka keuntungan materi.

UNIVERSITY NATIONAL DEVELOPMENT "veterans" EAST JAVA
FACULTY OF LAW

Name : Jaka Adipura
NPM : 0871010098
Birthday : Sampang, 26 May 1988
Studies : Strata 1 (S1)
Thesis Tittle :

Perpetrators of the Crime awaban Pertanggungj Signature Forgery
(Surabaya District Court Case Number: 2045/Pid.B/2010/Pn.Sby)

ABSTRACT

Grow up of current knowledge led to the whole society comfortable by these developments, so that people prefer the instant and quickly in any case, where it causes more people to violate the law emilih m, mi sal in megesahkan a letter, the more choose falsifying signatures to treat c epat perjanjia process or manufacture of the letter . This study aims to find out about the accountability of perpetrators of criminal acts of forgery, which it aims to discuss factors - factors fraud perpetrators of criminal acts and forms forged the signatures of legal entanglement for signature forgery. This study uses sociological juridical methodology. Source data used are secondary data that can be a primary law materials such as hu Act - Act of 1945, materials hu secondary law works - scientific papers, draft laws - laws, and also the results - the results of a study, materials such as bibliographies tertiary hu law, dictionaries and other - other. Analysis of data obtained using qualitative analysis of the data asking to source. The results can be summarized in the form factor - the drivers of the perpetrator in committing a fraud include economic factors, factors and factor law enforcement science and technology, type - type of signature forgery itself is included in the forged letter of Article 263 paragraph depend on 1 of the Criminal Code and Sporiuous Signature or signature essay, forged the signatures are also included in the types of fraud as our letter n. P er t counterweight judge in deciding a case of follow forged the signatures, which include behavioral considerations such as the defendant, the defendant's mental condition, state of the defendant and the defendant's identity. Different's decision judges away with a maximum sentence of paragraph 1 of article 263 of the Criminal Code, whereas fig Desc six years in case the decision number: 2045/Pid.B/2010/Pn.Sby, my only sanctioned form of confinement for 3 months in prison.

Keywords: Liability, Forgery Signature

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Jaka Adipura
NPM : 0871010098
Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 26 Mei 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/Pid.B/2010/Pn.Sby)

ABSTRAKSI

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini menyebabkan seluruh masyarakat dimanjakan oleh perkembangan tersebut, sehingga masyarakat lebih memilih cara instan dan cepat dalam hal apa pun, dimana hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih cara melanggar hukum, misal dalam megesahkan suatu surat, masyarakat lebih memilih memalsukan tanda tangan untuk mempercepat proses perjanjian atau pembuatan surat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemalsuan, dimana hal tersebut bertujuan untuk membahas faktor – faktor pelaku pemalsuan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan bentuk jeratan hukum bagi pelaku pemalsuan tanda tangan. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat bahan hukum primer misalnya Undang – Undang Dasar 1945, bahan hukum sekunder karya – karya ilmiah, rancangan undang – undang, dan juga hasil – hasil dari suatu penelitian, bahan hukum tertier misalnya bibliografi, kamus dan lain – lain. Analisa data menggunakan analisa kualitatif yang diperoleh dari data wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan berupa faktor – faktor pendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor penegakan hukum dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis – jenis pemalsuan tanda tangan itu sendiri yaitu termasuk dalam memalsukan surat berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP dan Spuriuos Signature atau tanda tangan karangan, pemalsuan tanda tangan juga termasuk ke dalam jenis pemalsuan surat sebagian. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dimana pertimbangan tersebut diantaranya mencakup perilaku terdakwa, kondisi mental terdakwa, keadaan terdakwa dan identitas atau status terdakwa. Keputusan hakim yang berbeda jauh dengan hukuman maksimal pasal 263 ayat 1 KUHP, enam tahun penjara sedangkan dalam putusan perkara nomor : 2045/Pid.B/2010/Pn.Sby, pelaku hanya dikenai sanksi berupa kurungan selama 3 bulan penjara.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pemalsuan Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan adat istiadat dan kepribadiannya yang luhur. Pada zaman dahulu Bangsa Indonesia sangat disegani oleh bangsa lain karena kepribadiannya dan kesantunannya.

Saat ini dapat diakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi sehingga malas melakukan sesuatu yang termasuk berat ataupun ringan, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai media mencerdaskan bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai – nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan. Dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis, tidak biasa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam

kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas – jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini juga bentuk tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan – peraturan hukum yang berlaku, dan itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita – citakan oleh the founding father sebagai suatu Negara hukum (Rechtsstaat / The Rule Of Law), UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “¹, dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara gambling, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial ; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu

¹ Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009, h.3

menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.²

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir – akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam – macam, Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting, di dalam sistem hukum pidana di Indonesia banyak sekali bentuk tindak pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk dan materai, dan pemalsuan surat, tindak pidana yang sangat menarik saat ini adalah pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan tanda tangan, dikarenakan pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan tanda tangan saat ini telah berkembang dengan pesat.

² Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, sinar grafika, Jakarta, 2007, h.3

Pemalsuan tanda tangan saat ini marak terjadi, semua itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi tersebut, padahal tanda tangan itu sendiri merupakan cara sederhana untuk suatu pengesahan adanya perjanjian dan atau bentuk jadinya atau disetujuinya proses perjanjian dan sebagainya. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau scanner, seperti contoh kasus yang pernah terjadi perihal pemalsuan tanda tangan yaitu ketika ibu Sundari memiliki tanah waris dari orang tua saudari, dimana ibu Sundari meminta tolong kepada saudara kandungnya yaitu H. M. Andy Suharmadji, BA untuk menguruskan ke Badan Pertanahan Negara agar dijadikan sertifikat hak milik tanah, seiring berjalannya waktu ibu Sundari menjual tanah petok D nomor 258 persil 3d-1 kepada bapak Gunawan, pada saat itu ibu Sundari tidak mengetahui bahwa tanah miliknya sudah menjadi sertifikat hak milik, pada saat itu juga ternyata tanah yang sudah diurus Andhy Suharmadji telah diurus menjadi sertifikat yang seolah olah ditanda tangani oleh ibu Sundari yang dijual kepada saudara Iwan Kusbianto dan dijadikan jaminan sebagai kredit di BDNI, dan dikarenakan terjadi kredit macet, maka BDNI melelang Sertifikat tanah tersebut dan dijual kepada Efendi Rustam, dari sini Efendi Rustam merasa Ibu Sundari menjual tanah tersebut kepada dua orang

sehingga Efendi Rusman melaporkan Ibu Sundari dan Gunawan, dari situ ibu Sundari tidak merasa menanda tangani pembuatan sertifikat tanah tersebut dan tidak menanda tangani jual beli tanah tersebut dengan Iwan Kusbianto, oleh karena itu saudara Andhy Suharmadji telah melakukan pemalsuan tanda tangan.

Masalah pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan tanda tangan tersebut. Masyarakat yang kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan tanda tangan seseorang. Mereka menganggap hal tersebut sebagai alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor - Faktor penyebab melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ?.

2. Bagaimana pertanggungjawaban bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan..
- b. Untuk mengetahui dan atau memahami pertanggungjaaban bagi pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

A. Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada khususnya dalam menghadapi perkembangan tindak pidana pemalsuan tanda tangan bersangkut paut dengan pemalsuan dokumen, spemalsuan surat, pemalsuan ijazah, dan dokumen – dokumen lainnya dengan menggunakan cara manual atau pun dengan menggunakan alat-alat modern seperti komputer, serta dapat menambah sumbangsih bagi kelengkapan hukum pidana di almamater penulis.

B. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan para pihak yang berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia terutama bagi masyarakat dalam menghadapi kejahatan pemalsuan tanda tangan beserta pemalsuan surat, ijazah dan dokumen-dokumen lain dengan mempergunakan cara manual ataupun dengan menggunakan alat-alat modern seperti komputer, mesin pengganda, dan alat-alat canggih lainnya.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan

1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³ Kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.⁴

Delik menurut pengertian sebagai “ Wesenchau “ telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan

³ Moeljanto, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.54

⁴ Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu HUKUM, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.123

yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum materiel. Apakah istilah perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah belanda “ strafbaar feit “, dimana arti dari strafbaar feit itu sendiri adalah :

Simons menerangkan, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁵, simons juga berpendapat bahwa strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku)⁶. yang dimaksud strafbaar feit sebagai delik adalah pelaksanaan / perkosaan kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum, dimana yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah hak – hak, hubungan – hubungan, keadaan – keadaan dan gangguan – gangguan masyarakat.⁷

Pengertian dari istilah “ starfbaar feit “ adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh

⁵ Ibid, h.56

⁶ C.S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,3, h.106

⁷ Ibid, h.107

peraturan undang – undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸

Jika melihat pengertian – pengertian ini, maka disitu dalam pokoknya ternyata :

- 1) Bahwa fiet dalam strafbaar feit berarti handling, kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁹

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum,. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹⁰

1.5.1.2 Macam – macam Tindak pidana

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian

⁸ Bambang Poernomo, Asas – asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h.91

⁹ Moeljanto, loc.cit., h.56

¹⁰ Ibid, h.2

tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.¹¹

1.5.1.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana

- a. Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
- b. Tindak pidana dilihat dari segi subyektif adalah bahwa akibat yang tidak di inginkan Undang – Undang, yang

¹¹ <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, 30 april 2012, 02:18

dilakukan oleh pelaku, dapatkan diberatkan kepadanya¹².

Dimana unsur secara subjektif dengan sengaja, dimana kesengajaan berdasarkan ajaran finale handlungslehre adalah suatu yang bersifat psikis, yang merupakan dari perbuatan, tetapi menurut pendapat PETERS kesengajaan itu termasuk dalam perbuatan, dan pendapat demikian ini diambilnya dari ajaran finale handlungslehre.¹³

1.5.1.4 Subjek Delik dan Rumusan Delik

Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melakukannya, dan delik itu harus ditunjukan kepada :

- a. Memprkosa suatu kepentingan hokum atau menusuk suatu kepentingan hukum (krenkingsdelicten), seperti pembunuhan , pencurian, dan sebagainya.
- b. Membahayakan suatu kepentingan hokum (gevaarzettingsdelicten) yang dibedakan menjadi :
 - 1) Concrete gevaarzettingsdelicten, seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang pasal 187, pemalsuan surat pasal

¹² L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan xxiv, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h.326-327

¹³ Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1985, h.35

263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian.

2) Abstracte gevaarzettingsdelicten, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya yang juga diatur di dalam KUHP.¹⁴

Bertalian dengan perumusan delik yang mempunyai sejumlah elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan, sebagian pendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Pembagian secara mendasar di dalam melihat perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

- a. Bagian yang objektif menunjuk delik terdiri dari perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (onrechtmatig) yang dapat diancam dengan pidana, dan ;
- b. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik.¹⁵

¹⁴ Bambang Poernomo, op.cit., h.92

¹⁵ Ibid, h.103

Menurut Apeldoorn bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig / wederrechtelijk) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan dengan hukum itu.

1.5.2 Definisi Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.¹⁶

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, 30 april 2012, 02:28

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

1. Macam - macam pemalsuan :

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan ientelektual tentang isi surat / tulisan.
- b. Pemalsuan uang : pemalsuan mata uang, uang kertas Negara / bank,dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang bentuk surat / tulisan.
- d. Pemalsuan merk : pemalsuan merk dengan maksud menggunakan / menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah merk yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara / peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya / menyuruh orang lain untuk memakainya seolah – olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan : pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen / peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan / menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah tulisan yang asli.¹⁷

¹⁷ Andi Hamzah, Terminology hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.112-113

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat – surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.¹⁹

Menurut penerjemah Prof. Dr. M. David, sesuai dengan teks tulisan tersebut, yang dapat dianggap sebagai falsum itu hanyalah apabila orang telah meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari tulisan atau dari suatu buku kas ataupun telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman yang terdapat dalam kolom debet dari suatu buku

¹⁸ <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html>, 30 april 2012, 02:11

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, 2001, h.2

kas, tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya, yakni jika orang dengan sesuatu cara telah membohong pada waktu melakukan perhitungan.²⁰

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b) Unsur – unsur objektif :
 - 1. Barang siapa;
 - 2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - 5. Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.²¹

Pemalsuan secara materiil itu juga dapat dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau suatu tulisan seolah olah merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli, padahal kenyataannya tidak demikian.²²

²⁰ Ibid, h. 3

²¹ Ibid, h 7-8

²² Ibid, h. 6

1.5.2.2 Faktor – Faktor Pemalsuan Tanda Tangan

Faktor – Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut yaitu, factor social ekonomi, factor penegakan hukum, dan factor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).²³

Sehubungan dengan ini dan yang erta hubungannya adalah adanya barisan penegak hukum yang mempunyai integritas yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hokum dan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa aparatur pemerintah penegak hukum benar – benar “ In- Act “ (bekerja, tidak tanpa guna). Penanganan lapporan adanya kejahatan secara benar – benar dapat dirasakan memang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, semua itu faktor yang ikut berbicara tentang penanggulangan kejahatan secara preventif.

Di samping faktor – faktor tersebut diatas yang secara preventif dapat mencegah timbulnya kejahatan, maka yang perlu dan penting juga untuk mendapatkan perhatian adalah perbaikan keadaan sosial ekonomi masyarakat itu. Keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya

²³ repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17867/5/Abstract.pdf

kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya jelek.²⁴

1.5.2.3 Pemalsuan Dalam Surat – Surat (Valscheid in geschrift)

Demikianlah judul titel XII buku KUHP, maka KUHP berturut – turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum., jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat – surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat – surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu – individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.²⁵

A. Membuat surat palsu (VALSCHELIJK OPMAKEN)

Hal ini terjadi misalnya apabila :

- 1) Seseorang A membuat surat seolah – olah berasal dari B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan B;
- 2) Seorang membuat surat dengan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar (intellectueele valsheid);

²⁴ Hand Out, Mata Kuliah Kriminologi, h. 15 - 16

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2010, h.187

- 3) Seorang A mengisis kertas kosong yang ada tanda tangan dari B dengan tulisan yang tidak benar (blancoseing).²⁶

B. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP pasal 263

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH.Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.

Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUH.Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Adapun Pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-tang atau yang

²⁶ Ibid, h. 190

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut:

1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- (1) barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya enam tahun.
- (2) dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Penjelasan :

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membikin surat palsu atau memalsukan surat :

- 1) Yang dapat menerbitka sesuatu hak ;
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perutangan;
- 3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;

- 4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Selanjutnya ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

- a) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya : surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham, dan lain sebagainya.
- b) Surat yang dapat menerbitkan suatu peruntungan misalnya surat kuasa untuk dapat membuat utang.
- c) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal , misalnya : akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain sebagainya.
- d) “ surat palsu “ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar)

- e) “ memalsukan surat “ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.
- f) “ memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk dalam pengertian “ memalsukan surat “. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- g) “ dapat mendatangkan kerugian “, tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “ kemungkinan “ saja.
- h) Yang diartikan “ kerugian “ tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian – kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.²⁷

²⁷ R. sugandhi, KUHP Kitab Undang – undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, 1980, h. 280-281

1.5.3 Definisi Dokumen, Surat, Akta, dan Tanda Tangan.

Dokumen adalah surat yang tertulis / tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti atau keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian).²⁸

Surat adalah :

- a. kertas (kain, dan sebagainya) yang bertulis (berbagai –
bagai isi maksudnya,
- b. secarik kertas (kain, dan sebagainya) sebagai tanda /
keterangan.²⁹

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pernyataan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.³⁰ Tanda tangan adalah nama yang dituliskan secara khas dengan tangan oleh orang itu sendiri.³¹

1.5.4 Definisi Pertanggung Jawaban

Untuk memperjelas mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana itu, baik kita lihat apa yang ditulis oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, 1990, h.211

²⁹ Ibid, h. 872

³⁰ Ibid, h,17

³¹ Ibid, h.895

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.³²

Pengertian Pertanggungjawaban Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan

³² Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.105.

sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

a. Keadaan Jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).

b. Kemampuan Jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Adapun menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggungjawabannya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
2. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya tersebut.

Selain itu menurut, doktriner untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal yaitu Adanya kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafannya tentang baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Sementara itu berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskannya secara Negative yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu :

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.

2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.³³

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang mutakhir.³⁴

³³ <http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> 12.01 AM.

³⁴ Soerjono Soekamto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1993. hal. 10.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (Penelitian Lapangan).

Termasuk dalam data sekunder meliputi buku – buku, buku – buku harian, surat – surat pribadi dan dokumen – dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan publik, yang bersifat pribadi misalnya surat – surat, sejarah kehidupan seseorang, buku – buku harian dan lain – lain, sedang yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi mahkamah agung dan sebagainya. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber / bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer, misalnya Undang – Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang – Undang dan lain – lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya karya – karya ilmiah, rancangan undang – undang, dan juga hasil – hasil dari suatu penelitian.

- c. Bahan hukum tertier, misalnya bibliografi, kamus dan lain – lain.³⁵

1.6.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu pengumpulan data dengan data :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Metode penelitian lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat – pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan peneliti berdasarkan kemauannya) dan / atau random sampling (ditentukan peneliti secara acak).³⁶

1.6.4 Teknik Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema – tema dan merumuskan hipotesa – hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis

³⁵ Ibid, h.14

³⁶ Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.107

data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber – sumber yang ada³⁷. Penulis dalam analisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit, karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.³⁸

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan: Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kajian

³⁷ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 66

³⁸ Rianto Adi, metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2010, h. 128

Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menjawab rumusan masalah pertama faktor – faktor pendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab, subbab yang pertama tentang jenis pemalsuan tanda tangan yang dilakukan dalam putusan nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby, subbab yang kedua tentang faktor – faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Bab Ketiga, menjawab rumusan masalah kedua mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Pada bab ini terdiri pada beberapa subbab, subbab yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi dalam putusan nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby, subbab yang kedua tentang analisa pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Dalam

bab ini penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan usulan-usulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan skripsi ini.